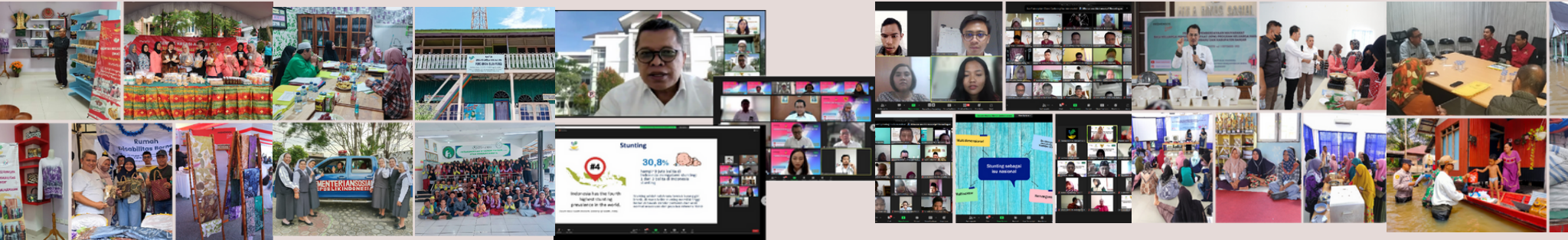


LAPORAN KINERJA BBPPKS BANJARMASIN TAHUN 2022



[bppks.banjarmasin](https://www.instagram.com/bppks.banjarmasin)



Balai Besar Kesos Banjarmasin



[bppks_BJM](https://twitter.com/bppks_BJM)



[bppks banjarmasin](https://www.youtube.com/channel/UC...)



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan.

Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak, baik para stakeholder maupun para aspiran dalam memberikan sumbangan informasi yang akuntabel, reliabel, informatif, dan suportif dalam penyusunan laporan kinerja ini. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kinerja BBPPKS Banjarmasin yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Pejanjian Kinerja BBPPKS Banjarmasin Tahun 2022.

Penyusunan laporan kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi sampai seberapa target capaian keuangan, fisik dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin periode Januari sampai dengan September Tahun Anggaran 2022.

Dalam penyusunan laporan kinerja ini kami telah berupaya semaksimal mungkin dan kami sangat menyadari bahwa, dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih belum sempurna karena itu kami sangat berharap saran dan kritik yang membangun guna perbaikan mutu laporan ini. Semoga Laporan Kinerja BBPPKS Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Demikian laporan ini disajikan dengan harapan dapat bermanfaat khususnya untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin.

Banjarbaru, Februari 2023
Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan
Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin

LAODE TAUFIK NURYADIN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka melaksanakan kebijakan presiden mengenai penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas kementerian sosial maka, pada bulan September - Desember tahun 2022 terjadi perubahan struktur organisasi atau SOTK baru di Kementerian Sosial. Dengan adanya SOTK Baru ini maka terjadi perubahan 1). Perubahan kode satker 3693752 menjadi 690553; 2). Perubahan sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja.

BBPPKS Banjarmasin tahun 2022 mempunyai 6 sasaran kegiatan dengan 8 indikator kinerja untuk mengukur ketercapaiannya 1 diantaranya belum didapatkan nilainya, 7 indikator capaiannya 100%. sementara itu untuk realisasi anggaran 96,36 % dari pagu sebesar Rp. 6.811.847.000.

SASARAN KEGIATAN 1

Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar

1. Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuh

TARGET

100%

REALISASI

100%

TARGET

73%

REALISASI

72,41%

SASARAN KEGIATAN 2

Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar

2. Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi

SASARAN KEGIATAN 3

Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos

3. - Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi

TARGET

83%

REALISASI

90,95%

- Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat

TARGET

97%

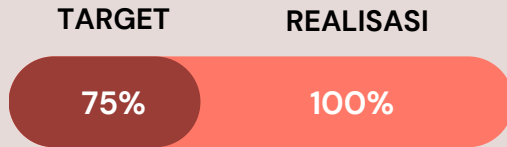
REALISASI

100%

SASARAN KEGIATAN 4

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian Kecakapan Hidup Penerima Manfaat

4. Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta Diklat yang Memiliki Kecakapan Hidup



SASARAN KEGIATAN 6

Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan BBPPKS Banjarmasin

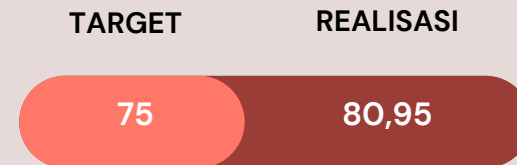
6. Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan BBPPKS Banjarmasin



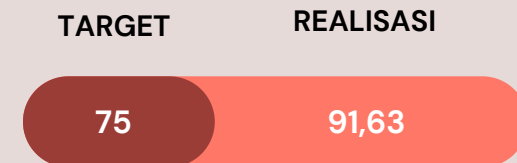
SASARAN KEGIATAN 5

Terwujudnya tatakelola yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi

5. - Nilai Hasil Evaluasi SAKIP



-Nilai Kinerja Anggaran



DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif
Kata Pengantar
Daftar isi
Daftar Gambar
Daftar Tabel
Daftar Diagram



BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Gambaran Umum Organisasi
- D. Isu Strategis
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kerja Tahunan
- C. Perjanjian Kinerja
- D. Kegiatan dan Anggaran

BAB III CAPAIAN KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Kinerja Organisasi
- C. Sandingan Capaian Kinerja Organisasi 2020 -2022
- D. Analisis Capaian Kinerja Organisasi
- E. Akuntabilitas Keuangan
- F. Analisis Efisiensi

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Tahun 2022 BBPPKS Banjarmasin merupakan wujud pertanggungjawaban BBPPKS Banjarmasin atas pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi, pemanfaatan sumber daya, dan pelaksanaan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2022, sebagaimana yang diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Pasal 3 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja, dan Review Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Sosial RI mewajibkan setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial RI, wajib menyusun penetapan kinerja dan pengukuran target kinerja, dan penyusunan laporan evaluasi kinerja.

Laporan Kinerja BBPPKS Banjarmasin ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi untuk menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun mendatang, dengan tujuan untuk mengukur kinerja dan pencapaian sasaran kegiatan BBPPKS Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.





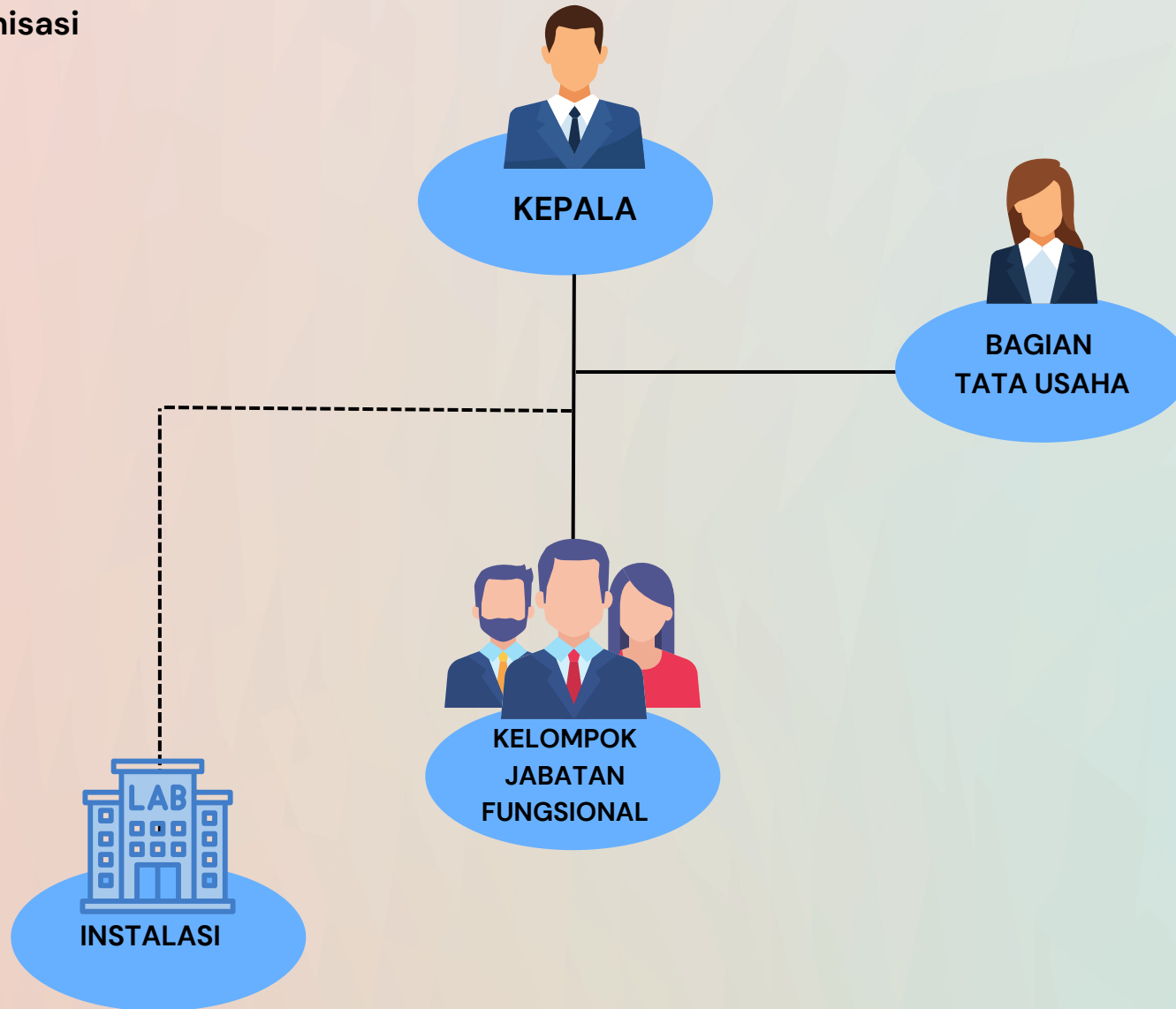
B. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan Fungsi BBPPKS diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

- 1 penyusunan rencana, program, dan anggaran
- 2 pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial aparatur dan masyarakat
- 3 pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial
- 4 pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat;
- 5 pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial
- 6 pelaksanaan advokasi dan asistensi serta kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial
- 7 pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial
- 8 pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- 9 pelaksanaan urusan tata usaha.

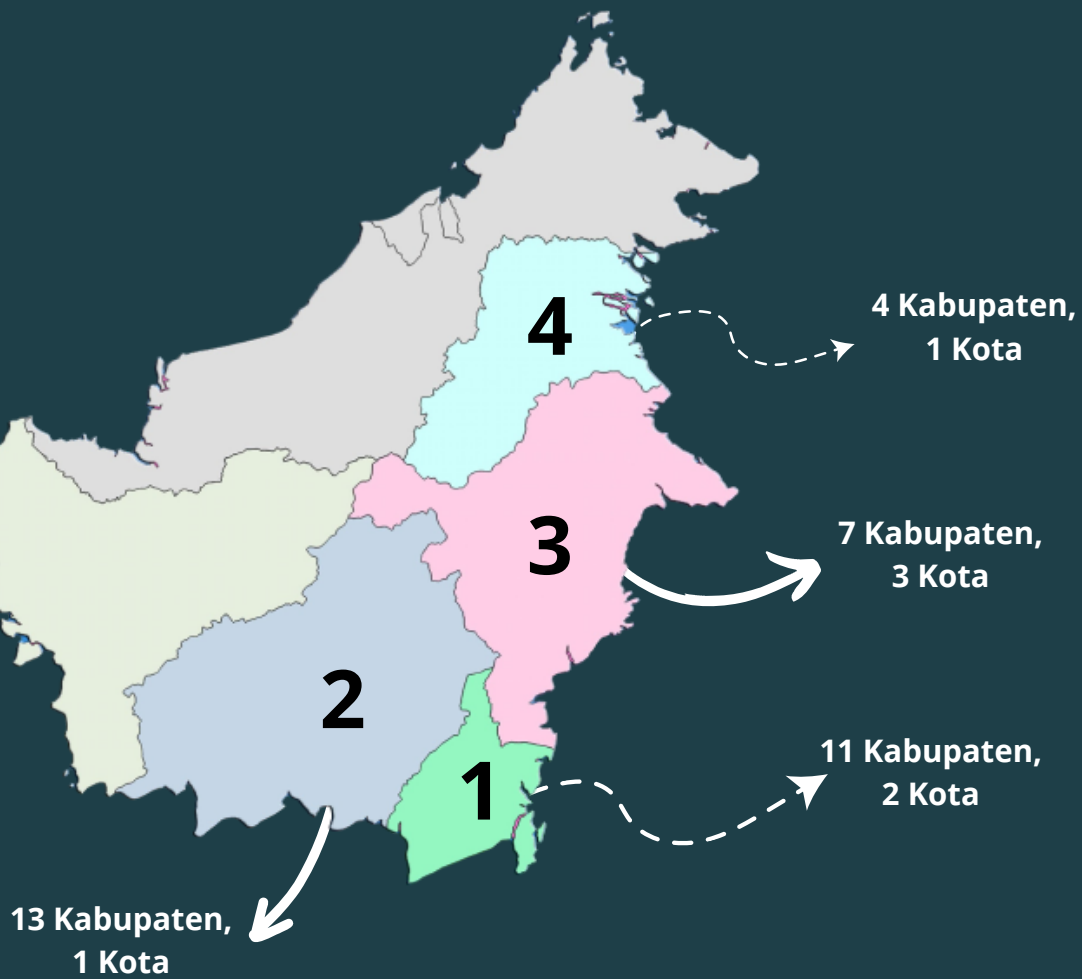
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Struktur Organisasi



Tugas dan Fungsi di BBPPKS
Sesuai Permensos Nomor 2 Tahun 2022

WILAYAH KERJA



1. Kalimantan Selatan



2. Kalimantan Tengah



3. Kalimantan Timur



4. Kalimantan Utara

SOP PEMBELAJARAN LURING BBPPKS BANJARMASIN



SOP PEMBELAJARAN DARING BBPPKS BANJARMASIN





KAMPUS I
Jl. Batu Besar No.
9, Mulawarman
Kota Banjarmasin



- Gedung Kantor
- Gedung Asrama (2 lantai), 40 kamar
- Wisma Tamu (2 lantai)
- Gedung Olahraga (Badminton)
- Ruang Makan (1 Unit)
- Ruang Kelas (3 Unit)
- Ruang Aula (1 Unit)
- Ruang Jabatan Fungsional (3 Unit)
- Ruang Instalasi Lab. Peksos (3 Unit)
- Perpustakaan (1 Unit)
- Ruang Genset (2 Unit)
- Rumah Dinas (3 Unit)

SARANA PRASARANA

BBPPKS BANJARMASIN



GALERI FOTO KAMPUS II

- PERPUSTAKAAN
- RUANG KELAS
- FASILITAS BAND
- STUDIO MINI
- ASRAMA TAMU

Gedung Kantor (3 Lantai)

Gedung Asrama (6 Blok - 2 lantai),
96 Kamar

Wisma Tamu (2 lantai), 6 Kamar

Gedung Serbaguna (1 Unit)

Gedung Olahraga & Gym (1 Unit)

Mushola (1 Unit)

Ruang Makan dan Dapur (1 Unit)

Gedung Pendidikan (2 Blok - 2 & 3
Lantai)

Ruang Arsip (3 Unit)

Ruang Aula (1 Unit)

Teater Terbuka (1 Unit)

Studio Mini (1 Unit)

Perpustakaan (1 Unit)

Ruang Kesehatan & Laktasi (1 Unit)

Ruang Jabatan Fungsional (3 Unit)

Ruang Konseling (1 Unit)

Ruang Command Center (1 Unit)

Ruang Sekretariat Sertifikasi dan
Akreditasi (1 Unit)

Perpustakaan (1 Unit)

Pos Satpam (3 Unit)

Ruang Genset (1 Unit)

Ruang Pompa (2 Unit)

Rumah Dinas (4 Unit)

Garasi (2 Unit)

2. Sumber Daya Manusia



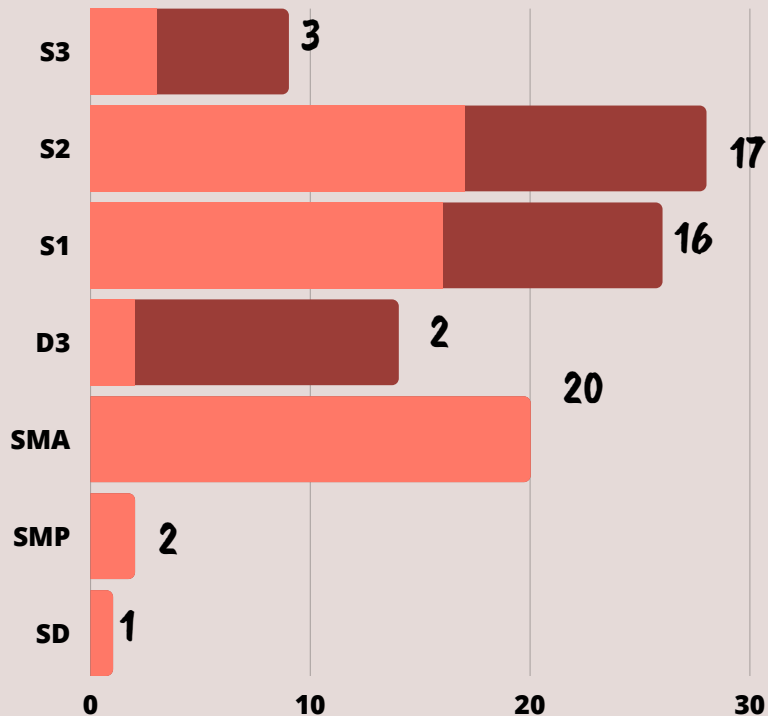
49 Orang



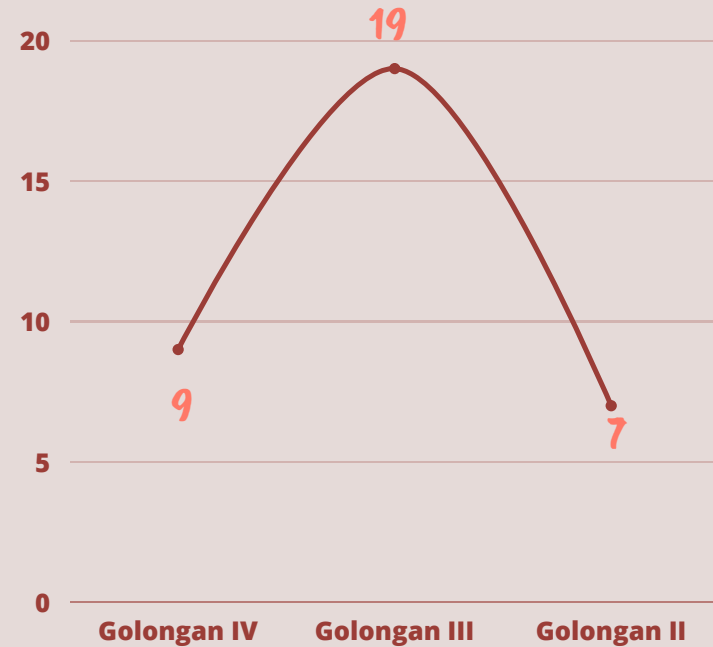
13 Orang

BBPPKS Banjarmasin memiliki jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) orang dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN/ Honorer) sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) orang, terdiri dari 48 (Empat Puluh Delapan Orang) orang laki-laki, dan 13 (Empat Belas) orang perempuan, dengan kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan yang beragam. Berikut disajikan deskripsi ASN BBPPKS Banjarmasin.

Berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan Golongan



D. ISU STRATEGIS

Isu Strategis BBPPKS Banjarmasin yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1

Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial aparatur, non aparatur dan masyarakat secara terencana, terpadu dan berkelanjutan. Upaya pengembangan SDM kesejahteraan sosial melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diembannya. Pelaksanaan Diklat tahun 2020 masih difokuskan pada pencapaian target Prioritas Nasional Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS) yang mendukung suksesnya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dilaksanakan sejak Tahun 2015. Target Tahun 2015 sebanyak 176 orang Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH), target Tahun 2016 sebanyak 182 orang SDM PKH, Tahun 2017 sebanyak 60 orang SDM PKH, dan untuk target Tahun 2018 sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) orang SDM PKH, target Tahun 2019 sebanyak 1.142 (seribu seratus empat puluh dua) orang, target tahun 2020 sebanyak 16 (enam belas) orang. Khusus tahun 2021 target Prioritas Nasional Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Stunting Bagi SDM Keos Regional Kalimantan dengan target sebanyak 1080 (seratus delapan puluh) orang , serta target tahun 2022 sebanyak 1090 (seratus sembilan puluh) orang dengan sasaran Wilayah Jawa Timur.

Sehingga dalam kurun waktu tahun 2015 – 2021 BBPPKS Banjarmasin telah melakukan kegiatan peningkatan kompetensi bagi SDM pendamping PKH melalui diklat P2K2/FDS dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Stunting, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2.848 orang. Tahun 2022 BBPPKS Banjarmasin akan melakukan kegiatan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial melalui Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Stunting bagi SDM Kesos dengan jumlah 1.090 orang.

2

Transformasi metode kediklatan berbasis teknologi dan informasi menjadi e-learning. Seiring tahun 2022 pandemi covid -19 masih melanda diseluruh dunia berimbas pula penyebarannya ke Indonesia. Dalam pelaksanaan diklat terhadap tenaga kesejahteraan sosial aparatur dan non aparatur mengalami penyesuaian metode pembelajaran yang awalnya metode klasikal (tatap muka) menjadi dalam jaringan (e-learning).

3

Penyederhanaan birokrasi pada BBPPKS Banjarmasin sesuai dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, dan Permensos Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, dengan komposisi Kepala BBPPKS (Eselon II b), Kepala Bagian Tata Usaha (Eselon III a) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

4

Berdasarkan keputusan menteri sosial republik indonesia nomor 221/huk/2022 tentang sentra layanan sosial pada balai besar pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial, politeknik kesejahteraan sosial bandung, dan pusat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi bahwa BBPPKS menyelenggarakan fungsi layanan langsung kepada masyarakat. Untuk itu BBPPKS Banjarmasin menyelenggarakan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat kepada KPM PKH. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat graduasi KPM PKH sehingga mereka dapat hidup mandiri dan menjadi inspirasi bagi KPM PKH lainnya. Pada pelatihan pemberdayaan masyarakat, KPM PKH dilatih oleh Widyaiswara dan praktisi usaha agar KPM PKH bisa mengembangkan usaha yang sudah rintisnya. Selain itu, KPM PKH juga memperoleh bantuan berupa peralatan usaha agar mereka bisa meningkatkan produksi serta meningkatkan laba dari kegiatan usahanya.

5

Penambahan fungsi dan peran Balai selain melaksanakan kediklatan juga melaksanakan Multilayanan dalam bentuk Service Center mencakup kegiatan Tanggap Darurat Bencana, Respon Kasus, Crisis Center, dan Layanan Dukungan Psikososial.

6

Untuk mendukung pelaksanaan multilayanan perlu dilakukan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) , sarana prasarana, jejaring kerja dan dukungan anggaran.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Sosial, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja BBPPKS Banjarmasin adalah sebagai berikut :

BAB I

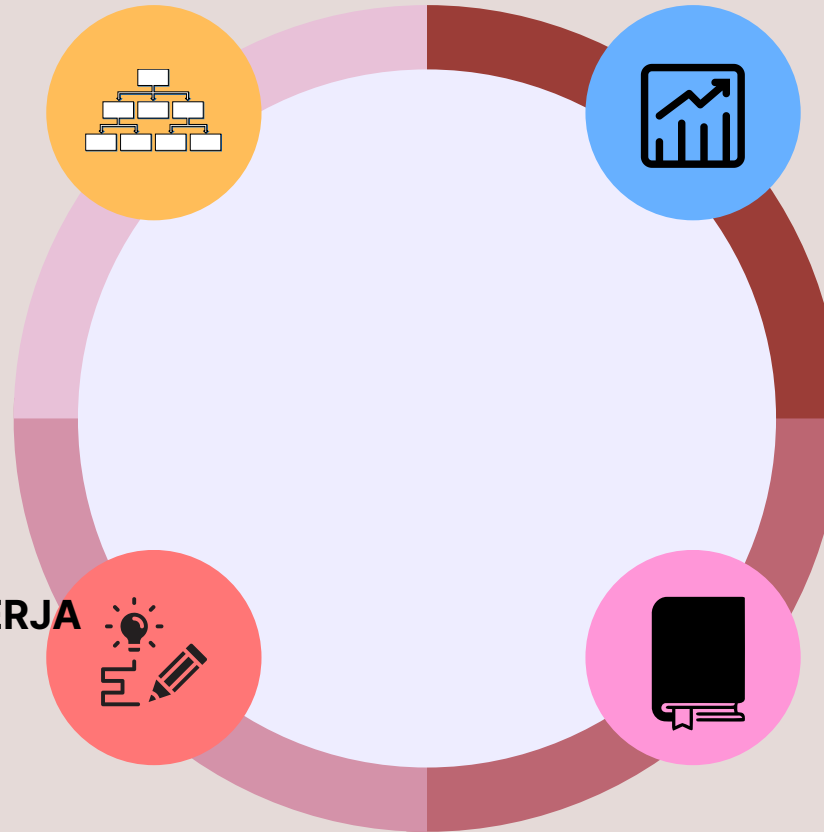
PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta isu strategis yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisari perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.



BAB III

CAPAIAN KINERJA

Pada bab ini dipaparkan capaian kinerja organisasi, menyajikan capaian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, dan disetiap pernyataan sasaran kinerja tersebut dilakukan analisis capaian kinerja, Analisis Efisiensi

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan permasalahan, solusi/ rekomendasi



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategi Kementerian Sosial Tahun 2020- 2024. Renstra Kementerian Sosial tahun 2020-2024 disusun dengan merujuk pada RPJMN 2020-2024.



Reviu
Rencana Strategis
2020-2024

elaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yang juga merupakan Visi dan Misi Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020 – 2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi Pekerjaan Sosial (Pusdiklatbangprof) Kementerian Sosial R.I adalah Menjadi unit Kementerian Sosial yang akuntabel dan kredibel dalam mewujudkan SDM kesejahteraan sosial yang unggul dan kelembagaan bidang kesejahteraan sosial yang profesional.

VISI

“Menjadi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang akuntabel, dan kredibel dalam rangka mewujudkan SDM kesejahteraan sosial yang unggul”.

MISI

- 1.Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
- 2.Meningkatkan kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Regional Kalimantan melalui pendidikan dan pelatihan di BBPPKS Banjarmasin.
- 3.Meningkatkan sinergi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah Regional Kalimantan melalui penguatan multi layanan.
- 4.Mengembangkan jejaring kerja kediklatan dengan multi pegiat kesejahteraan sosial baik secara regional, nasional, internasional, maupun global.
- 5.Meningkatkan infrastruktur/sarana prasana pengembangan kapasitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial berbasis teknologi dan informasi.

TUJUAN

“memenuhi kebutuhan latihan tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, penyuluh sosial relawan sosial dan masyarakat agar memiliki kompetensi kerja yang dipersyaratkan dalam tugas jabatannya”

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menggambarkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta targetnya berdasarkan kebijakan, program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). RKT berisikan tentang program dan kegiatan yang prioritas dan target yang akan dilaksanakan selama satu tahun.

	NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JUMLAH (TARGET)	SATUAN	CAPAIAN	PAGU (RUPIAH)		RENCANA CAPAIAN (%)	CAPAIAN (%)	
							OTK Lama	OTK Baru			
Perlindungan Sosial	1	Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar	Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi	50	Orang	50 Orang		Rp. 37.187.000	100%	100%	Respon Kasus 5 Klien ditambah Gempa Cianjur 45 (15 orang x 5 Desa)
	2	Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar	Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi	30	Lembaga	21 LKS		Rp. 53.138.000	73%	72,41%	Sivitasi dan mengikuti proses akreditasi 30 LKS atau 100%
	3	Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos	Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi	500	Orang	424 Orang		Rp. 123.150.000	83%	90,59%	Peserta yang mendaftar Akt 1,2 dan 3 sebanyak 416 orang. Akt 4 sebanyak 270 Orang. 43 tidak kompeten 424 kompeten total 468 orang
			Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat	1090	Orang	1090 Orang	Rp. 448.438.000	Rp. 873.911.000	97%	100%	Satker lama 930 orang Satker baru 160 Orang
	4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian Kecakapan Hidup Penerima Manfaat	Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta Diklat yang Memiliki Kecakapan Hidup	330	Orang	330 Orang		Rp. 1.941.210.000	75%	100%	Semua peserta sudah merintis usahanya
	5	Terwujudnya tatakelola yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	75	Nilai	80,95	Rp. 6.414.142.000	Rp. 3.783.251.000	75	80,95	Nilai sakip tahun 2021
Nilai Kinerja Anggaran			75	Nilai	89,41			75	91,63	Adanya proses likuidasi	
6	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan BBPPKS Banjarmasin	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan BBPPKS Banjarmasin	90	Nilai	91,93			90	91,93	Alumni Diklat Stunting 957 orang dan Pemberdayaan Masyarakat 301 orang	
Jumlah								Rp. 6.862.580.000		Rp. 6.811.847.000	



RENCANA KERJA TAHUNAN BBPPKS BANJARMASIN 2022



C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus dari dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi/lembaga, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) atau sanksi (punishment).

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar	Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi	100%
2	Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar	Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi	73%
3	Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos	Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi	83%
		Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat	97%

4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian Kecakapan Hidup Penerima Manfaat	Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta Diklat yang Memiliki Kecakapan Hidup	75%
5	Terwujudnya tatakelola yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	75
		Nilai Kinerja Anggaran	75
6	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan BBPPKS Banjarmasin	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan BBPPKS Banjarmasin	90



Perjanjian Kinerja
BBPPKS Banjarmasin
2022

D. ANGGARAN

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2022 BBPPKS Banjarmasin melaksanakan tugas dan fungsinya, didukung anggaran yang bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN), melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2022, Nomor : SP DIPA-027.11.2.369752/2022, Tanggal 17 November 2021 dengan pagu senilai

OTK LAMA

Rp. 16.607.769.000

OTK LAMA

Rp. 6.811.847.000



RKAKL
BBPPKS
Banjarmasin

ANGGARAN PERSASARAN KEGIATAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
1	Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar	Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi	100%	Rp. 37.187.000
2	Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar	Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi	73%	Rp. 53.138.000
3	Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos	Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi	83%	Rp. 123.150.000
		Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat	97%	Rp. 873.911.000

4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian Kecakapan Hidup Penerima Manfaat	Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta Diklat yang Memiliki Kecakapan Hidup	75%	Rp. 1.941.210.000
5	Terwujudnya tatakelola yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	75	Rp. 3.783.251.000
Nilai Kinerja Anggaran		75		
6	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan BBPPKS Banjarmasin	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan BBPPKS Banjarmasin	90	



BAB III CAPAIAN KINERJA



A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja BBPPKS Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah dilakukan antara Kepala BBPPKS Banjarmasin dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi Pekerjaan Sosial (Pusdiklatbangprof) Kementerian Sosial RI, yaitu membandingkan antara target dengan realisasi kinerja pada setiap indikator kinerja sasaran dan juga membandingkan dengan capaian kinerja dari tahun sebelumnya, serta dilakukan analisis terhadap faktor keberhasilan ataupun ketidakberhasilan capaian pada tahun tersebut dengan tahun sebelumnya. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan revisi terakhir dokumen perjanjian kinerja BBPPKS Banjarmasin.

Rumus Pengukuran Kinerja



$$\text{Capaian Kinerja} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100 \%$$

Sesuai dengan Permensos nomor 19 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Sosial, pengumpulan laporan kinerja adalah sebagai berikut:

- Laporan kinerja UKE II disampaikan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Laporan kinerja UKE I disampaikan paling lambat 45 hari setelah tahun anggaran berakhir.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja BBPPKS Banjarmasin tahun anggaran 2022 merupakan awal dari target yang ditetapkan dalam rencana strategis 5 (lima) tahunan dari tahun 2020 sampai dengan 2024.

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis BBPPKS Banjarmasin sebagai kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU tersebut menjadi bahan dasar dalam membuat Indikator Kinerja (IK) BBPPKS Banjarmasin dengan memperhatikan sasaran kegiatan. Dengan demikian, sebagai acuan dalam melakukan kinerja BBPPKS Banjarmasin dalam rangka melayani kepada masyarakat, BBPPKS Banjarmasin menetapkan perjanjian kinerja. Tabel dibawah ini menggambarkan pencapaian kinerja BBPPKS Banjarmasin Tahun 2022.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar	Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar	Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi	73%	72,41%	99,19%

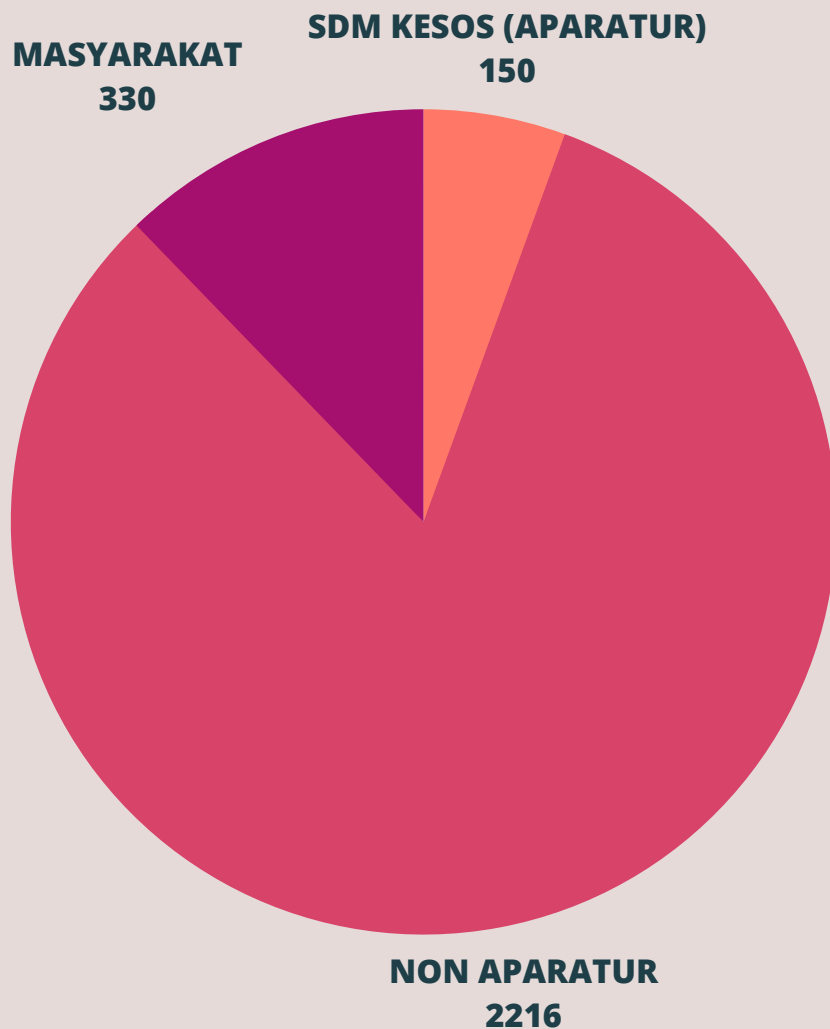
3	Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos	Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi	83%	90,59%	109,14%
		Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat	97%	100%	103%
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian Kecakapan Hidup Penerima Manfaat	Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta Diklat yang Memiliki Kecakapan Hidup	75%	100%	133,33%

5	Terwujudnya tatakelola yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	75	80,95	107.93
		Nilai Kinerja Anggaran	75	91,63	122,17
6	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan BBPPKS Banjarmasin	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan BBPPKS Banjarmasin	90	91,93	102,14



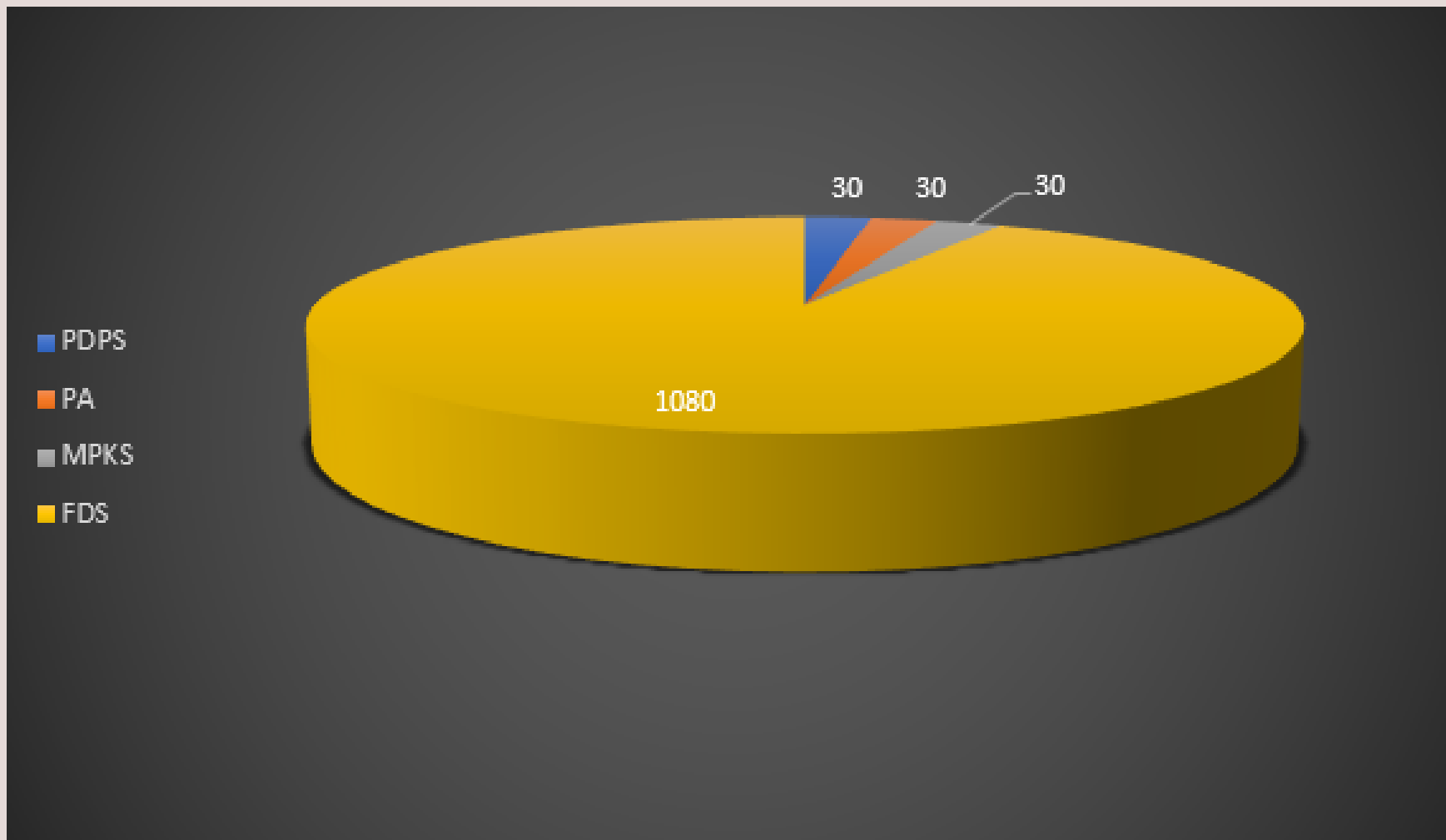
C. SANDINGAN CAPAIAN KINERJA DARI TAHUN 2020 – 2022

SA SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			TAHUN 2021			TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI TARGET	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lulusan Peserta Diklat Kesejahteraan Sosial Bagi Aparatur (TKSP) dengan Predikat Nilai Baik	-	-	-	60 Orang	60 Orang	100	90 Orang	90 orang	100
Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar	Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi	100%	100%	100%						
Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar	Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi	73%	72,41%	99,19%						
Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos	Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi	83%	90,59%	109,14%						
	Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat	97%	100%	103%	1.080 Orang	1.075	99,54	46 Orang	46 orang	100
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian Kecakapan Hidup Penerima Manfaat	Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta Diklat yang Memiliki Kecakapan Hidup	75%	100%	133,33%						
Terwujudnya tatakelola yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	1. Nilai SAKIP BBPPKS Banjarmasin TA 2022	75	80,95	107,93	81	80,77	A	80	A	80,77
	2. Nilai Kinerja Anggaran BBPPKS Banjarmasin TA 2022	75	91,63	122,17	85	92,43	109	85	108	91,52
Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan BBPPKS Banjarmasin	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan BBPPKS Banjarmasin	90	91,93	102,14	3,5	3,5	100	3,5	109	3,82

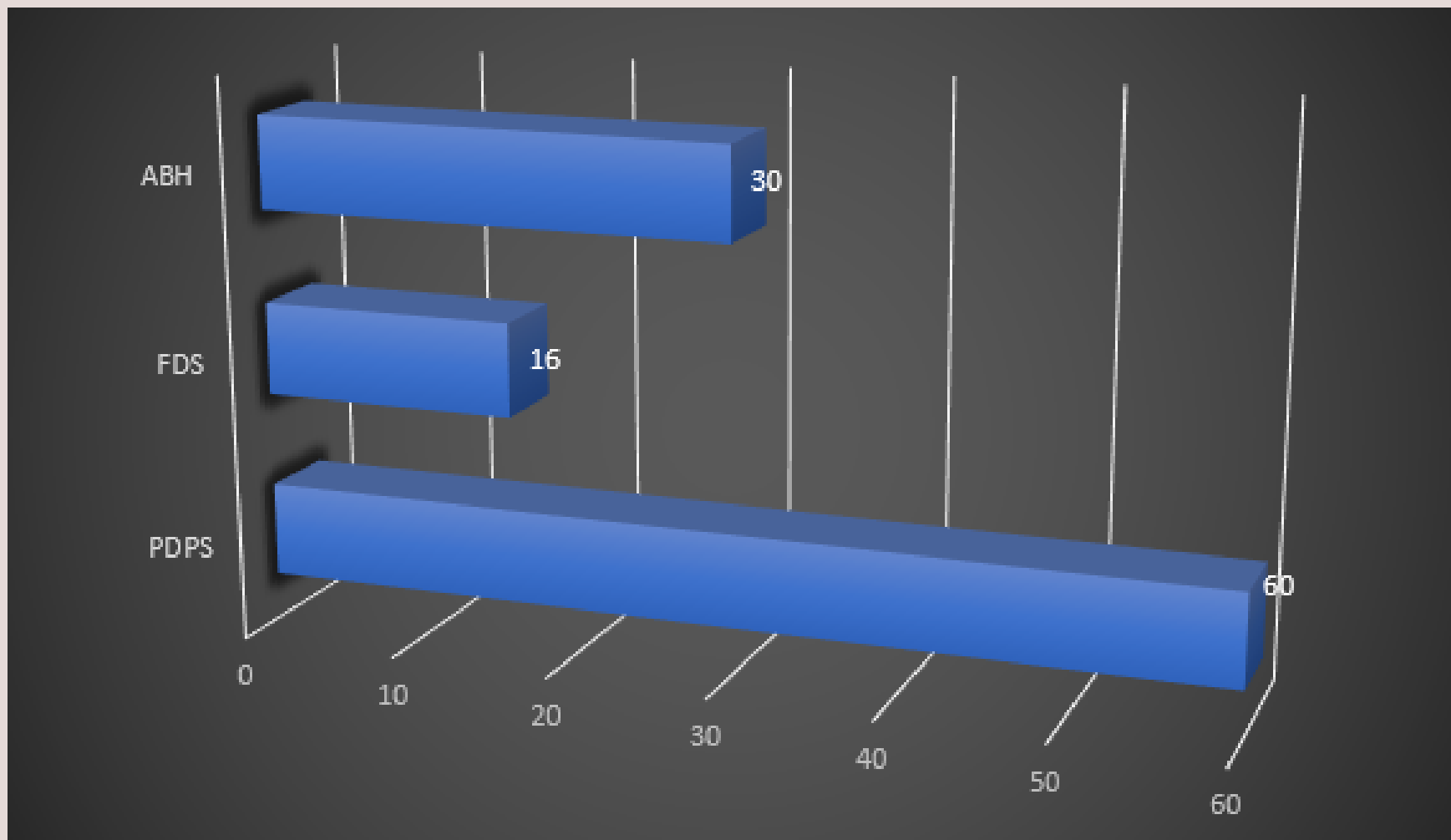


Capaian target Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial di wilayah Regional Kalimantan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan selama rentang waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2022

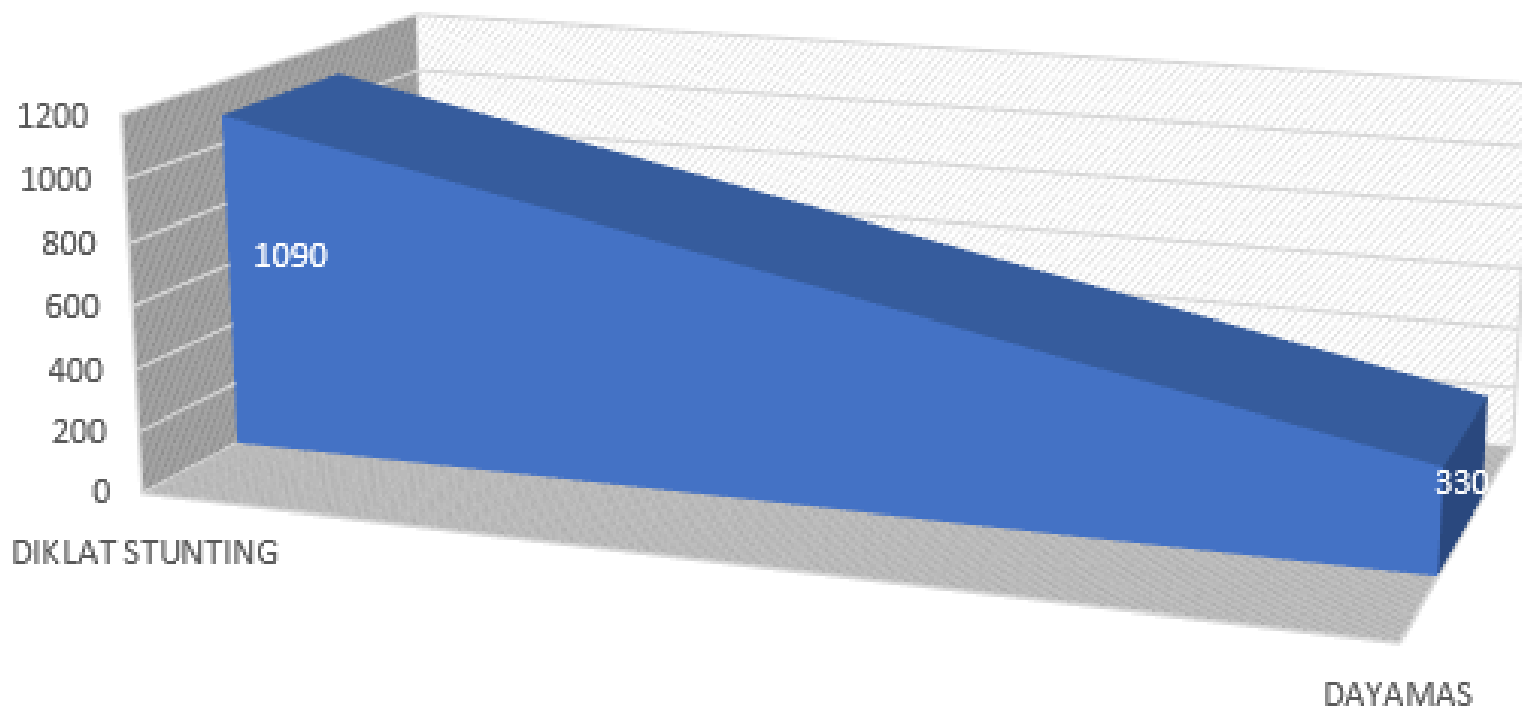
DIKLAT TAHUN 2020
BBPPKS BANJARMASIN



DIKLAT TAHUN 2021
BBPPKS BANJARMASIN



DIKLAT TAHUN 2022
BBPPKS BANJARMASIN



D. ANALISIS CAPAIAN KINERJA



TERPENUHINYA KEBUTUHAN DAN HAK DASAR

Pencapaian Indikator Kinerja 1 sebesar 100 % atau 50 orang. Sasaran program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh balai terdiri dari 5 Kluster (Anak, Penyandang Disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat aduktif lainnya, usia lanjut) dan korban bencana alam, sosial, dan nama lain bencana yang ditetapkan oleh pemerintah serta PPKS lainnya.



Pelatihan Pemberdayaan Penyintas Bencana Gempa Bumi di Cianjur, dengan bentuk dapur kreasi dan Layanan Dukungan Psikososial di Desa Ciputri Kecamatan Pacet, Desa Mangunkerta Kecamatan Cugenang dan Desa Nagrak Kecamatan Cianjur

Layanan Dukungan Psikososial (LDP)



RESPON
KASUS
BBPPKS
BANJARMASIN

Respon Kasus Dan Kedaruratan



- Respon kasus terhadap korban rudapaksa di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
- Lansia terlantar di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
- Warga lumpuh membutuhkan pengobatan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
- Warga yang trauma kehilangan anggota keluarganya dalam bencana Banjir di Kalimantan Barat.
- Warga kecelakaan membutuhkan pengobatan di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.
- Respon bagi penyintas Banjir dengan penyaluran bantuan logistik ke Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi	100%	100%	100%



MENINGKATNYA KUALITAS LEMBAGA DI BIDANG KESOS YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN SOSIAL SESUAI STANDAR



AKREDITASI
BBPPKS
BANJARMASIN

BBPPKS Banjarmasin melakukan Visitasi ke Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebanyak 30 Lembaga atau 100% akan tetapi 1 LKS tidak mengikuti proses akreditasi dikarenakan dokumen belum siap.

Rumus pencapaian akreditasi

$$\frac{\text{Jumlah LKS terakreditasi}}{\text{Jumlah LKS yang mengikuti proses akreditasi}} \times 100\%$$



Adapun Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi sebanyak 21 LKS atau 72,41% dengan Rincian LKS yang mendapat nilai B sebanyak 6 LKS, yang mendapatkan nilai C sebanyak 15 LKS, yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 1 LKS dan Tidak Ter Akreditasi (TTA) sebanyak 8 LKS. Kendala yang dihadapi selain LKS yang menjadi target sasaran akreditasi di tahun 2022 berjumlah sedikit juga terkendala keterbatasan anggaran serta lembaga tersebut belum memenuhi syarat, kriteria serta kelayakan untuk terakreditasi.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi	73%	72,41%	99,19%



MENINGKATNYA KAPASITAS SDM PENYELENGGARA KESOS



SERTIFIKASI
BBPPKS
BANJARMASIN

a. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial melalui uji kompetensi, tujuan sertifikasi memberikan pengakuan atas kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Sasaran SDM Sertifikasi BBPPKS Banjarmasin Tahun 2022 sebanyak 500 Orang dengan rincian berdasarkan data BNBA sebagai berikut :

1. TKS
 - Pendamping Sosial PKH sebanyak 200 Orang
 - Pendamping Sosial UEP sebanyak 125 Orang
2. Relawan Sosial (RS)
 - Relawan Sosial LKS sebanyak 268 Orang
3. Peserta Tambahan Sebanyak 270 Orang dari Tenaga TKS dan RS

Rumus perhitungan sertifikasi

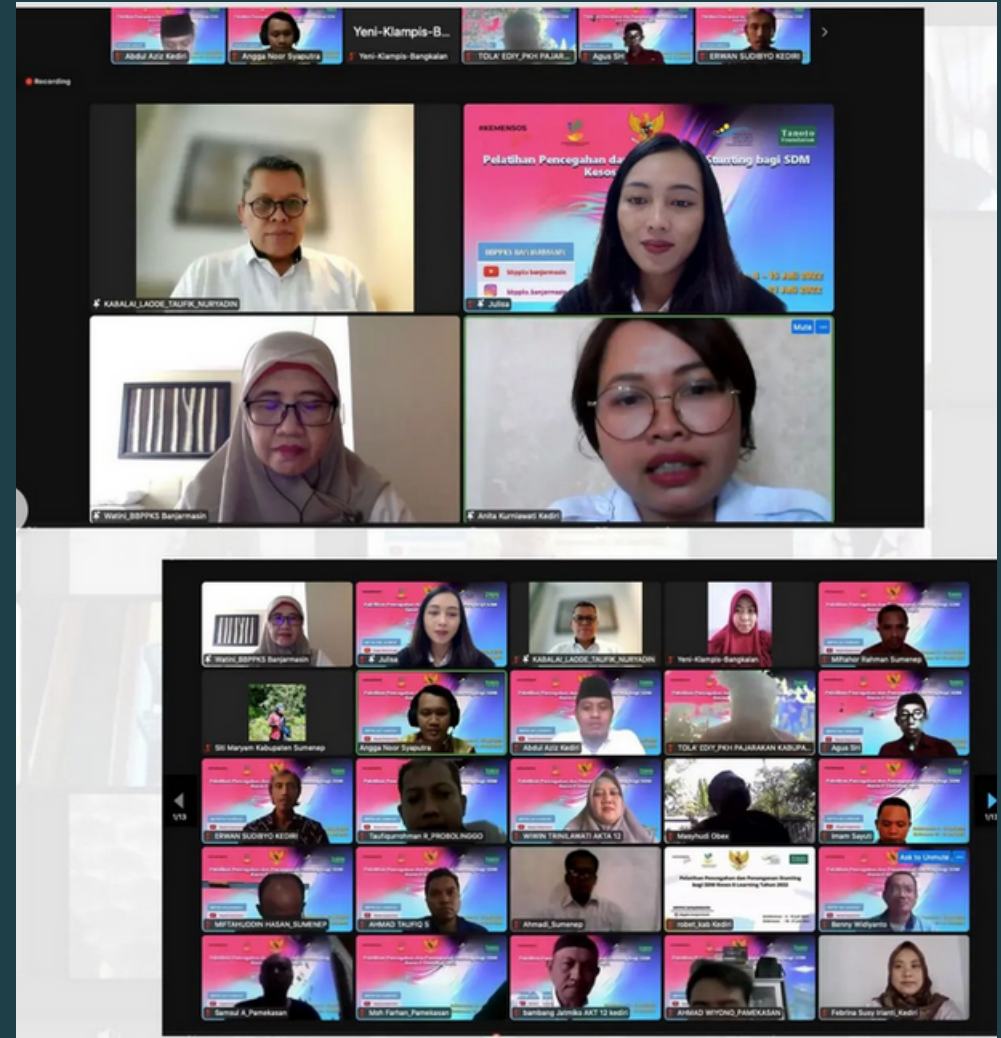
$$\frac{\text{Peserta Kompeten}}{\text{(Peserta Kompeten + Peserta Belum Kompeten)}} \times 100$$



Jumlah peserta yang mengikuti bimtek pra sertifikasisebanyak 687 orang, yang mengikuti ujian dan wawancara sebanyak 468 orang, akan tetapi yang berkompeten/ memperoleh sertifikat sebanyak 424 orang dan belum kompeten (tidak lulus) sebanyak 44 orang sehingga pencapaian BBPPKS Banjarmasin sebesar 90,59 %.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi	83%	90,59%	109,14%
	Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat	97%	100%	103%

b. SDM Kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat Dalam hal ini adalah Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Stunting bagi SDM Kesos, peserta pelatihan tahun anggaran 2022 berasal dari SDM PKH wilayah Jawa Timur berjumlah 1000 orang dan Kalimantan Barat berjumlah 90 orang. Dikarenakan adanya proses likuidasi satuan kerja pencapaian terbagi menjadi 2, pada Satker lama pencapaian SDM yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Stunting bagi SDM Kesos sebanyak 930 orang dan pada satker baru sebanyak 160 orang atau 100%.



PELATIHAN
STUNTING
BBPPKS
BANJARMASIN



MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN DIKLAT YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN KECAKAPAN HIDUP PENERIMA MANFAAT

Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat ini difokuskan pada konsep penguatan keterampilan kewirausahaan bagi para KPM. Lebih khusus lagi, pelatihan ini diarahkan untuk bisa memberi pembekalan keterampilan secara langsung kepada para KPM untuk mengembangkan usaha yang telah mereka rintis. Proses asesmen dilakukan sebelum pelaksanaan pelatihan kepada para calon peserta untuk mengetahui lebih jauh kondisi usaha mereka, keterampilan yang dibutuhkan dan perlengkapan pendukung usaha yang diperlukan. Dengan melakukan asesmen kita mendapatkan masukan mengenai materi dan narasumber dan instruktur yang dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas mereka. Melalui pelatihan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan hasil asesmen diharapkan para peserta mampu mengembangkan usahanyadan mempercepat proses kemandirian dan graduasi para KPM melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan jiwa kewirausahaan mereka. Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat di BBPPKS Banjarmasin Tahun 2022 ada 3 bidang keterampilan yaitu bidang kuliner, ternak itik dan kerajinan.



NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta Diklat yang Memiliki Kecakapan Hidup	75%	100%	133,33%



Peserta Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022 sebanyak 330 orang dibagi menjadi 4 gelombang. Gelombang 1 sebanyak 1 angkatan atau 30 orang, gelombang 2 sebanyak 3 angkatan atau 90 orang, gelombang 3 sebanyak 3 angkatan atau 90 orang dan gelombang 4 sebanyak 4 angkatan atau 120 orang. setiap angkatan berjumlah 30 orang dan semua peserta berjenis kelamin perempuan.

Metode Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat ini dilaksanakan di lokasi yang mendekati tempat tinggal atau lokasi usaha peserta dengan pendekatan life skills training (aplikatif, langsung dipraktikkan, dan berbasis kebutuhan di lapangan). Proses pembelajaran pada pelatihan ini menggunakan model klasikal atau tatap muka langsung dengan menerapkan berbagai metode, antara lain: 1. Kontrak Belajar. Membangun kesepakatan antara fasilitator dan peserta dalam menjalani proses pembelajaran demi mencapai efektifitas dan tujuan bersama. 2. Ceramah. Penyampaian materi secara verbal oleh fasilitator dan narasumber 3. Tanya jawab. Tanya jawab antara fasilitator/narasumber dengan para peserta 4. Curah pendapat. Mendiskusikan satu isu/topik secara terbuka antara fasilitator/narasumber dengan para peserta di mana satu sama lain bisa saling merespon. 5. Simulasi. Mempraktikkan teori/konsep/langkah-langkah secara sederhana dengan menghadirkan situasi yang seolah menyerupai kenyataan 6. Praktik. Mempraktikkan secara langsung proses atau langkah-langkah yang disampaikan fasilitator/narasumber pada saat pembelajaran.

BBPPKS Banjarmasin berkomitmen untuk terus memantau dan melakukan pendampingan bagi para alumni pelatihan yang memiliki kemauan dan semangat untuk terus mengembangkan usahanya. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara online melalui Whastapp Group masing-masing angkatan dapat disimpulkan bahwa alumni mengalami peningkatan kecakapan hidup antara lain hasil produk sudah dikemas dan diberi label/nama, mempunyai NIB (Nomor Ijin Usaha) khususnya Angkatan 10 (kerajinan), menitipkan produk ke Galeri SKA Wasaka BBPPKS Banjarmasin dan mengikuti even-even pameran yang diadakan di kota Banjarmasin dan Banjarbaru.



PELATIHAN
DAYAMAS
BBPPKS
BANJARMASIN



TERWUJUDNYA TATAKELOLA YANG BAIK DENGAN KUALITAS LAYANAN DAN DUKUNGAN YANG TINGGI

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	75	80,95	107.93
	Nilai Kinerja Anggaran	75	91,63	122,17

- a. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BBPPKS Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 adalah dengan nilai target adalah 75 (Tujuh Puluh Lima), mengingat sandingan Nilai sakip Tahun 2020 BBPPKS Banjarmasin mencapai nilai 80,77 Kategori A dan pada tahun 2021 BBPPKS Banjarmasin sudah mencapai Nilai SAKIP 9580.95 atau Kategori "A" untuk tahun 2022 masih menggunakan nilai SAKIP 2021 dengan parameter ketersediaan dokumen antara lain : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, capaian kinerja. Dalam dokumen perencanaan kinerja yaitu dokumen (Renstra, RKAKL, RKT,TAPKIN, dan Rencana Aksi). Dokumen pengukuran kinerja yaitu E-smart PP39, E-SAKIP, E-Kinerja. Dokumen Pelaporan kinerja, Dokumen Evaluasi Internal yaitu Reviu Program dan Evaluasi kegiatan, evaluasi diklat (pra purna tes, evaluasi penyelenggaraan, evaluasi fasilitator, ujian online), evaluasi indek kepuasan masyarakat (IKM), evaluasi manfaat diklat. Dokumen capaian kinerja BBPPKS Banjarmasin mempunyai target SDM yang akan di latih 1420 orang. Realisasi nilai SAKIP tahun 2022 akan dilakukan review, penelaahan dan penilaian pada tahun 2023 oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI Bidang Penunjang melalui pengukuran dan penilaian terhadap dokumen perencanaan dan anggaran.

NILAI SAKIP

TAHUN 2020

80,77 (A)

TAHUN 2021

80,95(A)

b. Nilai Kinerja Anggaran BBPPKS Banjarmasin TA 2022, Target nilai kinerja anggaran BBPPKS Banjarmasin berdasarkan PK Tahun 2022 memiliki target nilai 75. Realisasi PK Nilai kinerja anggaran Tahun 2021 92,43 sedangkan PK nilai kinerja realisasi anggaran untuk Tahun 2022 sebesar 91,63 dengan realisasi anggaran Pada OTK Lama sebesar Rp 6.825.196.893 (Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dari pagu Sebesar Rp 6.862.580.000 (Enam Milyar Delapan ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi pada OTK baru sebesar Rp 6.564.200.207 (Enam Milyar Lima ratus Enam Puluh Empat Juta Dua ratus Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah) dari total Pagu sebesar Rp 6.811.847.000 (Enam Milyar Delapan ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Kualitas pelaksanaan anggaran tercermin dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Keuangan (IKPA) yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). IKPA mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai Kinerja anggaran diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut

$$(60\% \times \text{Nilai SMART}) + (40\% \times \text{IKPA})$$

Sandingan Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran	
Tahun 2021	Tahun 2022
92,43	91,63



MENINGKATNYA KEPUASAN STAKEHOLDER TERHADAP LAYANAN BBPPKS BANJARMASIN



IKM
BBPPKS
BANJARMASIN

berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survei tersebut menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan. Survei dilakukan bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan BBPPKS Banjarmasin	90	91,93	102,14

Perhitungan Pencapaian Survey Kepuasa Masyarakat

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$



Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil nilai tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut

$$IKM = SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil pengukuran dari kegiatan survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00 – 2, 5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Pada tahun 2021 Pelatihan/Pendidikan Dasar Pekerjaan Sosial (PDPS) nilai IKM BBPPKS Banjarmasin adalah 80,42 atau Baik dan Diklat Pencegahan dan penanganan Stunting diperoleh nilai IKM BBPPKS Banjarmasin adalah 82,14 atau Baik.

Pada tahun 2022, jumlah responden survei kepuasan masyarakat di BBPPKS Banjarmasin sebanyak 1.258 orang, yang terdiri dari alumni Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Stunting bagi SDM Kesos 993 dari Orang dan Masyarakat (Keluarga Penerima Manfaat (KPM)) 301 orang yang mengikuti pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Bagi KPM PKH s. Nilai Interval Konversi BBPPKS Banjarmasin tahun 2022 sebesar 91,93 dengan Nilai Mutu Pelayanan A (Sangat baik).

NILAI IKM

TAHUN 2021

81.28

TAHUN 2022

91.93

E. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja yang ada dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin sebagai berikut :

REALISASI KINERJA ANGGARAN BBPPKS BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	OTK Lama		OTK Baru	
				PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)
1	Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar	Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi	100%			Rp. 37.187.000	Rp. 37.165.000
2	Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar	Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi	73%			Rp. 53.138.000	Rp. 52.778.000
3	Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos	Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi	83%			Rp. 123.150.000	Rp. 110.089.000
		Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat	97%	Rp. 448.438.000	Rp. 445.081.577	Rp. 873.911.000	Rp. 859.125.100

4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian Kecakapan Hidup Penerima Manfaat	Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta Diklat yang Memiliki Kecakapan Hidup	75%			Rp. 1.941.210.000	Rp. 1.838.714.487	
5	Terwujudnya tatakelola yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	75	Rp 6.414.142.000	Rp. 6.380.115.316	Rp. 3.783.251.000	Rp. 3.666.328.620	
		Nilai Kinerja Anggaran	75					
6	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan BBPPKS Banjarmasin	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan BBPPKS Banjarmasin	90					
Jumlah					Rp. 6.862.580.000	Rp. 6.825.196.893	Rp. 6.811.847.000	Rp. 6.564.200.207

Dari tabel diatas, maka dapat diketahui capaian anggaran BBPPKS Banjarmasin Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan pagu anggaran sebesar Rp6.811.847.000 (Enam Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) realisasi anggaran sebesar Rp. 6.564.200.207 (Enam Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah), atau 96.36 % pada OTK lama, sedangkan pada OTK Lama pagu anggaran sebesar Rp 6.862.580.000 (Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) realisasi anggaran sebesar Rp. 6.825.196.893 (Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) atau 99.46%.

REALISASI ANGGARAN BBPPKS BANJARMASIN TAHUN 2022

No	Kegiatan	OTK LAMA		OTK BARU	
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
Program Perlindungan Sosial		448,438,000		3,028,596,000	
	Penyelenggaraan Diklat Pendamping Program Keluarga Harapan	448,438,000	445,081,577	873,911,000	859,125,100
	Penyelenggaraan Diklat Pemberdayaan Masyarakat			1,941,210,000	1,838,714,487
Pelayanan Sosial				37,187,000	37,165,000
Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti proses akreditasi				53,138,000	52,778,000
Sumber Daya Manusia Kesos yang telah mengikuti proses sertifikasi				123,150,000	110,089,000
Layanan Dukungan Manajemen Internal		5,740,616,000		3,508,794,000	
	Layana Hubungan Masyarakat			4,650,000	4,436,500
	Layanan BMN	3,000,000	3,000,000	17,155,000	17,047,000
	Layanan Umum	409,463,000	409,080,187	175,736,000	175,602,020
	Layanan Perkantoran	5,328,153,000	5,296,141,297	3,311,253,000	3,195,590,002
Layanan Manajemen Kinerja Internal		156,185,000		197,801,000	
	Layanan Perencana dan Penganggaran	74,811,000	74,809,047	46,221,000	46,149,798
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	13,629,000	12,448,600	82,900,000	82,900,000
	Layanan Manejemen keuangan	67,745,000	67,743,275	29,470,000	29,470,000
	Layanan reformasi kinerja			39,210,000	39,210,000
Layanan Manajemen SDM Internal		517,341,000		76,656,000	
	Layanan Manajemen SDM	109,974,000	109,972,010	76,656,000	75,923,300
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan TKS Peksos yg mengikuti diklat teknis 100 jp	407,367,000	406,920,900		
		6,862,580,000	6,825,196,893	6,811,847,000	6,564,200,207

F. ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi anggaran dengan realisasi capaian kinerja. Apabila capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran maka dapat dikatakan sudah efisien.

SASARAN KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN
Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar	100%	99.94 %
Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar	99.19%	99.32%
Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos	106.07%	93.85%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian Kecakapan Hidup Penerima Manfaat	133.33%	94.72%
Terwujudnya tatakelola yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	122.17	96.90%
Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan BBPPKS Banjarmasin	102.14	

Dari 6 sasaran kegiatan yang ditetapkan, capaian kinerjanya lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran, sehingga dapat dikatakan pelaksanaan anggaran BBPPKS Banjarmasin sudah efisien.

BAB IV PENUTUP



A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LK) Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan program, kegiatan dan anggaran yang tertuang dalam DIPA BBPPKS Banjarmasin. Di dalam laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja BBPPKS Banjarmasin.

BBPPKS Banjarmasin menetapkan sebanyak 6 (enam) Sasaran Kegiatan dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022, pencapaian kinerja atas Sasaran Strategis BBPPKS Banjarmasin melalui Indikator Kinerja. Hal ini merupakan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban BBPPKS Banjarmasin, melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022.

Perwujudan realisasi capaian kinerja sasaran Tahun Anggaran 2022 tersebut menyerap anggaran DIPA BBPPKS Banjarmasin sebesar Rp 6.811.847.000 (Enam Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) realisasi anggaran sebesar Rp. 6.564.200.207 (Enam Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah), atau 96.36 % pada OTK lama, sedangkan pada OTK Lama pagu anggaran sebesar Rp 6.862.580.000 (Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) realisasi anggaran sebesar Rp. 6.825.196.893 (Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) atau 99.46%

Target Tugas Pokok dan Fungsi BBPPKS Banjarmasin tahun 2022 adalah melaksanakan Diklat Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 330 orang dengan rencana pelaksanaan di bulan Oktober dan Desember. Kemudian Diklat Program Keluarga Harapan atau Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Stunting sebanyak 1090 orang, pelaksanaannya pada bulan Juli sampai dengan Bulan September. Capaian Target Diklat BBPPKS Banjarmasin tahun 2022 sebanyak 1420 orang telah mengikuti diklat.

BBPPKS Banjarmasin akan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dalam hal ini adalah pelaksanaan diklat kesejahteraan sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 14 Tahun 2017 tentang penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik, survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan.

B. REKOMENDASI

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial di BBPPKS Banjarmasin sebagai upaya optimalisasi seluruh komponen pendukung, kiranya diperlukan beberapa hal diantaranya :

1. Pengembangan Program dan Kegiatan dalam rangka merespon kebutuhan dan kepentingan Stakeholder BBPPKS Banjarmasin. Upaya yang ditempuh adalah dengan mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi.
2. Peningkatan kualitas penyelenggara pendidikan dan pelatihan, baik dari aspek pelayanan administrasi, sarana dan prasarana terutama aspek akademik. Pada administrasi perlu diupayakan penerapan aplikasi berbasis IT. Terhadap aspek sarana prasarana yang sebenarnya cukup memadai namun belum optimal tata laksana pemanfaatannya, perlu diupayakan pengorganisasian pelayanan yang lebih efektif guna merespon secara tepat dan tepat keluhan dan kebutuhan peserta pelatihan dan pendidikan terkait sarana prasarana.
3. Peningkatan implementasi berbagai sistem internal manajemen organisasi seperti sistem perencanaan, sistem pengendalian, sistem administrasi keuangan, sistem administrasi barang milik negara, sistem kearsipan, sistem monitoring evaluasi, yang terintegrasi dengan sistem akuntabilitas BBPPKS Banjarmasin.
4. Pengembangan SDM Internal, baik personil dalam jabatan pelaksana, jabatan fungsional maupun jabatan struktural.

